

ISSN 0852-8349

JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS JAMBI

SERI HUMANIORA

Volume 14, Nomor 1, Januari - Juni 2012

Daftar Isi

- Pengaruh Rasio Camel terhadap *Return Saham* pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)
Rico Wijaya, Mohd Ihsan dan Agus Solikhin 01 - 08
- Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Rumah Dinas Daerah Provinsi Jambi
Latifah Amir 09 - 18
- Identifikasi Agroteknologi Petani dalam Usahatani Tanaman Sayuran di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci
Miranti Sari Fitriani, Neliyati, Henny H., dan Yulia Alia 19 - 28
- Penilaian Pelaksanaan Proyek *E-Government* dalam Perspektif COBIT (Studi Kasus Kabupaten Sarolangun)
Dedy Setiawan dan Fitriaty 29 - 36
- Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Indra Jaya 37 - 46
- Revitalisasi Filantropi Islam di Kota Jambi (Studi pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota Jambi)
Besse Wediawati 47 - 54
- Analisis Perbedaan *Earnings Management* Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Dewi Fitriyani, Reka Maiyarni, dan Muhammad Gowon 55 - 60
- Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba
Wiwik Tiswiyanti, Dewi Fitriyani dan Wiralestari 61 - 66
- Instrumen Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Sawit dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi
Elita Rahmi 67 - 82
- Analisis Kepuasan Kerja Pegawai pada Universitas Jambi Kampus Sarolangun
Dahmiri dan Muhammad Ihsan 83 - 92

Pedoman Penulisan

PENILAIAN PELAKSANAAN PROYEK E-GOVERNMENT DALAM PERSPEKTIF COBIT (Studi Kasus Kabupaten Sarolangun)

Dedy Setiawan dan Fitriaty

*Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstract

E-government is meant to achieve a better, well organized, and integrated government system in order to improve skill, effectiveness, transparency, and responsibility of the government. However, there are still many e-government projects failed to be handled properly although the projects have been provided with large amount of budget. This research aims to analyze the e-government project application using a proposed framework as well as COBIT framework (Control Objective for Information and Related Technology). *COBIT* that was used to identify the success factors of e-government application in district of sarolangun. The case study results show that the failure factors of the e-government projects in district of sarolangun are human resources, limited budgets, organization culture, vision and mission, infrastructure, and stakeholders. These factors should be considered in future development of the e-government of district of sarolangun in order to ensure better and effective implementation.

Keywords : *E-government ; COBIT ; IT Governans*

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan internet telah menjadi alat kekuatan yang baru untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan dengan model yang baru. IT dan internet mendorong transformasi dari paradigma birokrasi tradisional (yang menekankan kepada kemampuan, rutinitas, pengkhususan, fokus kepada aktivitas pihak organisasi), menuju paradigma E-Government (yang menekankan kepada perencanaan jaringan yang terkoordinasi, berkerjasama dengan pihak luar dan berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utamanya) (Alfred 2002). Kini TI telah menjadi salah satu elemen utama dalam memperbaiki sistem manajemen pemerintahan (Slamet et al 2007).

Definisi *E-government* telah banyak dikemukakan oleh berbagai pihak. Bank Dunia atau *World Bank* (2002) memberikan definisi *E-government* sebagai salah satu kegiatan yang mengarah kepada penggunaan

teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab pemerintah. Sistem pemerintahan yang berasaskan TI dan internet (*E-government*) banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik antara organisasi pemerintahan, dengan organisasi pemerintahan, organisasi bisnis dan masyarakat secara luas (Keng et al 2005). Sehubungan dengan hal itu semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi-instansi pemerintahan kapan dan di mana saja tanpa di batasi oleh faktor ruang dan waktu.

Dalam usaha mewujudkan sistem pemerintahan yang berasaskan TI atau E-Government yang baik, teratur dan terintegrasi di antara instansi pemerintahan, maka perencanaan E-Government semestinya mempunyai manajemen perencanaan yang baik, agar manajemen yang akan dilaksanakan tersebut tidak sia-sia.

Salah satu manajemen yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *E-*

Governemnt adalah manajemen proyek. Bermodalkan kepada manajemen proyek yang sistematis, maka pembangunan *E-Governemnt* dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan diharapkan.

Secara umum, tahap keberhasilann suatu proyek IT dapat dikatakan sangat rendah. Melihat kepada hasil survei sekitar pertengahan tahun 1990an hanya sebanyak 10% proyek IT dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan (Turban et al 2005). Hasil penelitian dari pada *Standish Group Study (CHAOS)* membuktikan bahwa pada tahun 2000 hanya 28% proyek IT berhasil dilaksanakan berbanding dengan 49% proyek IT yang terpaksa dibatalkan sebelum proyek itu selesai dan 23% mengalami kegagalan. Tambahan juga menurut CHAOS selain mengalami penambahan anggaran salah satu faktor utama kegagalan proyek IT tersebut adalah mengabaikan perencanaan sistem manajemen proyek IT karena hal tersebut merupakan salah satu ukuran dalam keberhasilan suatu proyek *E-Governemnt* (*Standish Group Study* 2001).

Untuk mewujudkan sebuah sistem manajemen TI yang baik, berkualitas dan dinamik dari aspek waktu, biaya, insfrastruktur, sumber daya manusia dan risiko, manajemen proyek TI bisa merujuk kepada metode COBIT (Control Objective for Information and Related Technology). COBIT dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam merumuskan rencana strategik karena *framework* COBIT mempunyai cakupan proses yang lebih luas dan sesuai dengan tujuan sebuah organisasi (*World Bank* 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan proyek E-Government di kabupaten Sarolangun dengan tujuan dapat dijadikan tolak ukur bagi kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan proyek E-Government pada waktu yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proyek E-Government di Kab. Sarolangun, dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : wawancara langsung, analisa dokumen dan observasi untuk pengumpulan data. Setiap responden diwawancara karena teknik wawancara langsung berupaya untuk menghasilkan data yang berkualitas dan terperinci (Zulkarnain 2001). Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kepada kerangka konsep yang telah dibuat. Kerangka konsep ini amat penting sekali dalam menentukan arah tujuan dari penelitian ini agar dapat menempati objektif yang diinginkan.

Dalam Penelitian ini, menggunakan teknik sampel *purposeful* yang merupakan sebahagian dari teknik *non probality sampling* digunakan (Sugiyono 2005) karena hal ini sesuai digunakan untuk penelitian kualitatif, terutama dalam Penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan proyek E-Government di kabupaten Sarolangun. *Sampel purposive* merupakan teknik pengambilan sampel yang mengarah kepada *key informan* yang sudah jelas dapat memberikan informasi kepada peneliti. Sebagai contoh *sampel purposive* yang bisa digunakan dalam Penelitian ini adalah pelaksanaan proyek E-Government di Kab Sarolangun melalui sumber datanya adalah pihak berkepentingan yang turut serta dalam melaksanakan proyek E-Government di Kab Sarolangun.

Penentuan Ukuran sampel penelitian ini adalah berdasarkan kepada jumlah populasi individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek E-Government di lingkungan kabupaten Sarolangun seperti dalam tabel 1.

Setelah semua data yang diperlukan dikumpul melalui metode di atas, peneliti akan menjalankan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metod deskriptif (Nazir 1998). Metode deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkaji status sekelompok manusia, suatu objek, keadaan, serta sistem pemikiran ataupun peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Tujuan dari metode

Tabel 1. Jumlah individu dalam pelaksanaan proyek E-Government di kab Sarolangun

Keterangan	Perkiraan
Jumlah Intansi yang diambil sebagai sampel	= 3 Instansi
Jumlah Orang yang dijadikan sampel	
- Pimpinan di Instansi	= 3 Orang
- Pimpinan Proyek di Instansi	= 2 Orang
- Operator atau pengguna di Instansi	= 2 Orang
- Staff kabupaten	= 1 Orang

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, nyata dan sebenar mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Pada tahapan ini, Peneliti akan melihat beberapa hubungan antara fakta yang terjadi, sebab akibat sesuatu permasalahan dan sebagainya. Seterusnya Peneliti akan membuat beberapa kesimpulan terhadap data-data tersebut.

Selain menggunakan metod deskritif metode naratif dan *heuristic* digunakan dalam menganalisa dan menafsir data untuk memberi kesan dalam pelaksanaan proyek kabupaten di Sarolangun. Metode naratif digunakan untuk menyampaikan ‘makna’ informasi yang diperoleh dari wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan bertujuan menjawab pertanyaan yang telah dibangun sesuai dengan model kerangka konsepsi penelitian dari pelaksanaan proyek E-government di Kab. Sarolangun. Teknik wawancara didukung oleh data yang disesuaikan dengan model dengan tujuan untuk mencapai seluruh objektif.

Hasil analisis data yang diperoleh peneliti dari objektif pertama sehingga keenam seterusnya diinterpretasi dengan menggunakan manajemen COBIT yang merangkumi KGI, KPI dan model *maturity* dengan tujuan untuk mengetahui tahap-tahapan sebenarnya dan tahap-tahap lain yang tidak sesuai. Tahap kematangan tersebut dijadikan dasar untuk pelaksanaan E-government yang lebih baik.

Analisis Berdasarkan Metode Manajemen COBIT : Sumber Daya Manusia

Objektif pertama adalah dengan memberi fokus kepada sebagian sumber daya

manusia di Kab. Sarolangun, dengan tujuan agar pelaksanaan proyek E-government bisa berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis berdasarkan KGI dan KPI serta model kematangan seperti dibawah ini.

Indikator Tujuan Utama (KGI)

- (i) Kuantitas staff dan pimpinan yang mempunyai kemampuan IT cukup sesuai dengan kebutuhan.
- (ii) Latihan IT bagi staff dan pimpinan di Kab. Sarolangun mengikut rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (iii) Prestasi kerja staff dan pimpinan yang efektif dan efisien.
- (iv) Respon yang cepat dari staff dan pimpinan Di Kab. Sarolangun mengikut perkembangan IT dari waktu ke waktu.

Indikator Prestasi Utama (KPI)

- (i) Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan keperluan instansi.
- (ii) Waktu dan tempo pelatihan bagi staff, pimpinan dan pimpinan proyek mengikut keperluan dari pelatihan.
- (iii) Kemampuan staff dan pimpinan menggunakan IT dalam tempo waktu yang cepat.
- (iv) Staff dan pimpinan menyelesaikan tugas dalam tempo yang sesuai dengan waktunya.

Model Kematangan (Maturity)

Tahap model kematangan pada keseimbangan proses sumber manusia terdiri dari lima tahap seperti pada Tabel 2 : Tabel 2 menunjukkan rumusan tahap kematangan sumber manusia di Kab. Sarolangun berada pada tahap I yaitu *Initial/Ad-Hoc*, berarti pihak pemerintahan mengetahui keperluan peningkatan sumber daya manusia tetapi belum ada perancangan latihan yang terencana. Dengan demikian, usaha pihak Kab. Sarolangun adalah menyediakan pelatihan IT yang terencana untuk staff, pimpinan serta pimpinan proyek. Berdasarkan perbedaan kemampuan maka perlu meletakkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuannya, supaya mereka bisa mendukung pelaksanaan proyek E-government tersebut.

Tabel 2. Model Kematangan Sumber daya Manusia

Tahap	Ertinya	Penjelasan
0	<i>Non-Existent</i>	Belum adanya kesadaran dari pihak pemerintahan dalam peningkatan sumber manusia.
1	<i>Initial/Ad-Hoc</i>	Pihak pemerintahan telah mengetahui keperluan peningkatan sumber manusia, tetapi belum ada perencanaan latihan yang terstruktur.
2	<i>Repeatable but Intuitive</i>	Peningkatan sumber manusia mula di lakukan oleh pihak pemerintahan dengan menyediakan latihan bagi mendukung pelaksanaan E-government.
3	<i>Defined Process</i>	Prosedur penyedia sumber daya manusia mulai dilakukan . Peningkatan pengetahuan sumber manusia. Latihan telah ditentukan secara formal dan berstruktur dengan keadaan waktu saat ini.
4	<i>Managed and Measurable</i>	Pihak pemerintahan mulai menyusun pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia kepada pemerintahan. Adanya komitmen dan kerjasama dari staff, pimpinan dan pimpinan proyek terbatas pelaksanaan tugas yang dilakukan.
5	<i>Optimised</i>	Pihak pemerintahan mempunyai pembangunan pengaturan sumber daya manusia yang baik. Program latihan yang direncanakan dengan baik Penempatan staff, pimpinan yang sesuai dengan kemampuan.

* Tahap sebenarnya dari sumber manusia di Kab. Sarolangun

Analisis Berdasarkan Metode Manajemen COBIT: Biaya/Anggaran

Objektif kedua memberi fokus kepada biaya yang mendukung dalam pelaksanaan proyek E-government di Kab. Sarolangun. Tujuan dari analisis ini adalah agar pelaksanaan proyek E-government bisa berjalan dengan sasaran yang diharapkan oleh pihak pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis berasaskan KGI dan KPI serta model kematangan seperti dibawah ini.

Indikator Tujuan Utama (KGI)

- Biaya yang cukup dalam pelaksanaan proyek E-government.
- Membangun proyek E-government yang sesuai dengan tujuan dari pembangunan proyek tersebut.
- Membangun dengan baik E-government dan membentuk E-government mengikuti pengembangan IT setiap waktu.

Indikator Prestasi Utama (KPI)

- Jumlah biaya di sesuaikan dengan biaya yang ada pada buku perencanaan proyek E-government.
- Ukuran proyek E-government disesuaikan dengan keperluan E-government di Kab. Sarolangun.

- Waktu dan tempo yang sesuai dari pelaksanaan proyek E-government.

Model Kematangan (Maturity)

Tahap model kematangan pada keseimbangan proses biaya terdiri dari lima tahap seperti disajikan padaTabel 3. Tabel 3 merumuskan tahap kematangan biaya di Kab. Sarolangun berada pada tahap I yaitu *Initial/Ad-Hoc*, bermakna pihak pemerintahan telah menyediakan biaya namun biaya yang disediakan belum disesuaikan dengan biaya yang telah direncanakan oleh pihak manajemen proyek.

Berdasarkan dari hasil analisis biaya ini, maka peneliti menyarankan supaya pihak Kabupaten. Sarolangun mengkaji dengan teliti pengaturan biaya pembangunan proyek E-government sesuai dengan biaya yang telah direncanakan awal oleh pihak manajemen proyek. Kab. Sarolangun perlu juga menyediakan biaya yang khusus untuk perawatan dan perubahan E-government. Tujuan utama agar Kab. Sarolangun bisa mendukung keberhasilan dari pelaksanaan proyek E-government yang telah di rencanakan oleh pihak manajemen proyek.

Tabel 3. Model Kematangan Biaya

Tahap	Ertinya	Penjelasan
0	<i>Non-Existent</i>	Belum adanya kesadaran dari pihak pemerintahan dalam menyediakan biaya untuk pelaksanaan proyek E-government.
1	<i>Initial/Ad-Hoc</i>	Pihak pemerintahan telah menyediakan biaya namun biaya yang disediakan belum disesuaikan dengan biaya yang telah dibangun oleh pihak manajemen proyek.
2	<i>Repeatable but Intuitive</i>	Nilai biaya telah disediakan oleh pihak pemerintahan sesuai dengan keperluan pembangunan proyek E-government.
3	<i>Defined Process</i>	Peningkatan biaya dilakukan. Biaya disesuaikan dengan buku rencana pembangunan proyek E-government. Disediakan biaya khusus untuk pembiayaan operasi dan pengembangan E-government.
4	<i>Managed and Measurable</i>	Pihak pemerintahan mula menyusun rencanakan biaya yang sesuai. Penyediaan biaya yang sesuai dengan metode dalam pelaksanaan proyek E-government. Penyediaan Biaya yang lebih besar untuk pelaksanaan proyek E-government.
5	<i>Optimised</i>	Pihak pemerintahan mempunyai rencana pengaturan biaya yang baik. Biaya disesuaikan dengan keadaan proyek E-government. Penyediaan biaya untuk setiap instansi di Kab. Sarolangun.

* Tahap sebenarnya dari biaya di Kab. Sarolangun

Analisis Berdasarkan Metode Manajemen COBIT: Budaya Organisasi

Objektif ketiga memberi fokus kepada budaya organisasi di Kab. Sarolangun, agar pelaksanaan proyek E-government bisa berjalan dengan apa yang diharapkan pihak pemerintahan. Justru peneliti menganalisis melihat berasaskan KGI dan KPI serta model kematangan seperti dibawah ini.

Indikator Tujuan Utama (KGI)

- (i) Pemahaman yang baik mengenai E-government.
- (ii) Dukungan yang baik kepada pembangunan E-government di Kab. Sarolangun dari pihak staff dan pimpinan.
- (iii) Staff dan pimpinan mula mendapat manfaat dari pembangunan E-government.
- (iv) Fungsi E-government bisa memberikan keefektifan dan keefesien dalam memperoleh informasi pemerintahan.

Indikator Prestasi Utama (KPI)

- (i) Waktu dan tempoh latihan bagi staff dan pimpinan.

- (ii) Waktu dan tempoh memahami pengembangan IT.
- (iii) Keberhasilan implementasi E-government di Kab. Sarolangun.

Model Kematangan (Maturity)

Tahap model kematangan pada keseimbangan proses budaya organisasi terdiri dari lima tahap seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 merumuskan tahap kematangan budaya organisasi di Kab. Sarolangun berada pada tahap I yaitu *Initial/Ad-Hoc*, bermakna pihak staff dan pimpinan telah mengetahui manfaat dan tujuan dari E-government, tetapi tidak ada keinginan dari mereka untuk melakukan perubahan budaya organisasi dalam melaksanakan E-government tersebut.

Hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti khususnya untuk budaya organisasi, peneliti menyarankan supaya pihak Kab. Sarolangun merubah paradigma pemikiran staff dan pimpinan dengan cara memberikan penjelasan mengenai manfaat dan tujuan dari E- government, meningkatkan kesejahteraan dari staff dan pimpinan, serta memberikan latihan yang berterusan kepada

Tabel 4. Model Kematangan Budaya Organisasi

Tahap	Ertinya	Penjelasan
0	<i>Non-Existent</i>	Belum adanya kesadaran dari pihak staff dan pimpinan untuk menggunakan E-government dalam peningkatan prestasi pemerintahan.
1	<i>Initial/Ad-Hoc</i>	Pihak staff dan pimpinan telah mengetahui manfaat dan tujuan dari E-government, tetapi tidak ada keinginan dari mereka untuk melakukan perubahan budaya organisasi dalam melaksanakan E-government tersebut.
2	<i>Repeatable</i>	<i>but</i> staff dan pimpinan yang ada di pemerintahan telah sepenuhnya mendukung E-government.
3	<i>Intuitive</i>	
3	<i>Defined Process</i>	Pihak staff dan pimpinan telah memahami manfaat dan tujuan E-government. Peningkatan pengetahuan staff dan pimpinan dalam penggunaan IT.
4	<i>Managed</i>	<i>and</i> Pihak staff dan pimpinan dalam penyelesaian pemerintahan harus menggunakan E-government. Pemerintahan mula menyusun rencana pengembangan E-government. Adanya tanggungjawab dari staff, pimpinan terbatas penggunaan E-government.
4	<i>Measurable</i>	
5	<i>Optimised</i>	Pihak pemerintahan memberikan penjelasan manfaat dan fungsi dari E-government kepada seluruh staff dan pimpinan di pemerintahan. Peningkatan sumber Manusia. Jabatan staff dan pimpinan mengikut kepada kemampuan IT. Peningkatan kebajikan dari staff dan pimpinan di pemerintahan.

* Tahap sebenarnya dari budaya organisasi di Kab. Sarolangun

kepada staff dan pimpinan mengenai IT agar pelaksanaan proyek E-government bisa berjalan dengan apa yang diharapkan oleh pihak Kab. Sarolangun.

Analisis Berdasarkan Metode Manajemen

COBIT: Infrastruktur

Fokus objektif ini mengenai infrastruktur untuk proyek E-government sesuai dengan tujuan yang hendak di capai oleh Kab. Sarolangun. Penelitian ini dijalankan dengan cara menganalisa data berasaskan KGI dan KPI serta model kematangan seperti dibawah ini.

Indikator Tujuan Utama (KGI)

- (i) Infrastruktur yang baik untuk bisa mendukung E-government.
- (ii) Infrastruktur yang sesuai dengan keperluan dari E-government.
- (iii) Berhasilnya implementasi dari pembangunan E-government di Kab. Sarolangun.

- (iv) Biaya yang sesuai dengan penyediaan infrastruktur.

Indikator Prestasi Utama (KPI)

- (i) Infrastruktur disesuaikan dengan E-government.
- (ii) Fungsi dan kemampuan dari pada infrastruktur yang sedia ada.
- (iii) Jumlah infrastruktur yang sedia ada.
- (iv) Penilaian infrastruktur yang sedia ada dari setiap instansi yang ada pada Kab. Sarolangun.

Model Kematangan (Maturity)

Tahap model kematangan pada keseimbangan proses infrastruktur terdiri dari lima tahap seperti dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. merumuskan tahap kematangan infrastruktur di Kab. Sarolangun berada pada tahap I yaitu *Initial/Ad-Hoc*, bermakna infrastruktur yang mendukung E-government secara keseluruhan belum dimiliki dari instansi yang ada pada Kab. Sarolangun.

Tabel 5. Model Maturity Infrastruktur

Tahap	Ertinya	Penjelasan
0	<i>Non-Existent</i>	Belum adanya Infrastruktur yang mendukung dalam pembangunan E-government.
1	<i>Initial/Ad-Hoc</i>	Infrastruktur yang mendukung E-government belum secara keseluruhan dimiliki dari instansi yang ada kepada Kab. Sarolangun.
2	<i>Repeatable</i>	<i>but</i> Pemerintahan mulai memenuhi infrastruktur untuk mendukung E-government di Kab. Sarolangun.
3	<i>Intuitive</i>	Prosedur penyedia Infrastruktur IT.
4	<i>Defined Process</i>	Peningkatan Infrastruktur IT kepada pemerintahan. Infrastruktur dipertingkatkan sesuai dengan keadaan sewaktu.
5	<i>Managed</i>	<i>and</i> Pihak pemerintahan mulai menyusun pembangunan pengembangan Infrastruktur kepada pemerintahan. Adanya pengembangan Infrastruktur yang E-government dari waktu ke waktu pada waktu kedepan.
6	<i>Measurable</i>	Pihak pemerintahan mempunyai pembangunan pengaturan infrastruktur yang baik. Program peningkatan yang direncanakan dengan baik. Penyediaan infrastruktur yang baik dari setiap instansi yang ada pada pemerintahan.

* Tahap sebenarnya dari infrastruktur di Kab. Sarolangun .

Hasil dari analisis ini, peneliti menyarankan supaya pihak Kab. Sarolangun menyediakan infrastruktur yang mencukupi dari setiap instansi yang ada pada Kab. Sarolangun. Penyedia infrastruktur harus bersesuaian dengan keadaan sekarang sehingga infrastruktur tersebut bisa mendukung E-government. Sehubungan dengan ini, pemerintahan harus membuat suatu pembangunan untuk mengontrol keadaan infrastruktur yang telah ada supaya hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berasaskan kepada penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Keberhasilan pelaksanaan proyek E-government dari pemerintahan Kab/Kota salah satunya ditentukan oleh adanya keinginan dari pihak pemerintahan untuk melakukan perubahan, terlebih pada sebuah perubahan organisasi seperti budaya organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, biaya serta aturan hukum.

2. Pelaksanaan proyek E-government di pemerintahan Kab. Sarolangun saat ini dinilai berasaskan kepada model COBIT masih berada dalam tahap 1 yaitu initial/ad-hoc maknanya banyak hal yang harus dilakukan oleh pihak Kab. Sarolangun khususnya dalam perubahan organisasi seperti budaya organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, biaya serta aturan hukum. sehingga tujuan dari pihak pemerintahan untuk merencanakan E-government sesuai dengan tujuan awal.
3. Kab. Sarolangun pada waktu kedepan, dapat menggunakan Model COBIT sebagai asas dalam pembangunan proyek E-government sehingga pada waktu kedepan pelaksanaan proyek E-government dapat berjalan bersesuaian dengan tujuan dan harapan dari pihak Kab. Sarolangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred, Tat-kei Ho. 2002. Reinventing local government and the e-government initiative the Premier Journal of Public Administration Review (PAR). July-Augustus.62(4):433-444.

- Slamet, Abdul Razak bin Hamdan, Aziz Deraman. 2007. Restrukturisasi dan Reorientasi Menuju Percepatan Target E-Government di Indonesia. Bandung : Berbagai Makalah Sistem Maklumat Februari: 565-570.
- Standish Group Study (CHAOS). 2001. Extreme Chaos, http://www.standishgroup.com/sample_research/index.php
- The IT Governance Institute. 2005. IT Governance Global Status Report. <http://www.itgi.org>
- The IT Governance Institute. 2003. Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition. ITGI.
- World Bank. 2002. The e-government handbook for developing countries. A project of infodev and the center for democracy and technology. http://www.infodev.org/files/841_files_eGovernment_Handbook.pdf
- Zulkarnain. Z. 2001. Statistik Pengurusan. Malaysia : Universiti Utara Malaysia.